

Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Oleh : Yuliana Isnaningtyas

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

***Abstract.** Kandri, in Gunungpati subdistrict, is one of the the three village, that was decided as the tour villages, as stated in the decree of Semarang Mayor in 2012. The establishment of the Kandri tour village is aimed to improve the potency of people in Kandri to create the economic independence through tourism sector. This research is aimed to analyze the parthnership in the management of the Kandri tour village in Gunungpati subdistrict.*

The research method used is a qualitative approach, and the data collection techniques used are documentation, observation and interview. The source of the research are Department of culture and tourism of Semarang, Kandri village, Pandanaran and Sukomakmur tourism awareness group and people in Kandri.

The result of the research shows that the Pandanaran tourism awareness group is the one which has responsibility of the managemanet of the tour village. It is the actor which has the center role in creating the improvement of the Kandri tour village. All the involved elements have done their duty and function well so that the people gain the benefit directly and indirectly. The partnership in Kandri tour village is a psudeo parthnership that is appropriate to the condition in the village. Yet, the parthnership is usual and not sustainable. Most of the partnership is done through CSR given by the private institution to the people in Kandri through group of torism awareness. It also involves the government, acadmy and society.

Keywords : *Tour village, management, parthnership*

Abstrak. Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati adalah salah satu dari tiga kelurahan yang ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan SK Walikota Semarang pada tahun 2012. Pada prinsipnya Desa Wisata Kandri dibentuk guna meningkatkan keberdayaan masyarakat Kandri, dalam hal mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Kandri, Kelomok Sadar Wisata Pandanaran dan Sukomakmur, dan masyarakat desa wisata Kandri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola Desa Wisata Kandri adalah Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis. Pokdarwis merupakan aktor yang mempunyai peran yang sangat sentral dalam mewujudkan kemajuan Desa Wisata Kandri. Semua elemen yang berperan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan berbagai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun jenis kemitraan yang ada di Desa Wisata Kandri merupakan jenis kemitraan semu (*psudeo partnership*) hal tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan dimana kemitraan tersebut terlihat *as usual* dan belum berkelanjutan. Sebagian besar kemitraan yang ada dilakukan melalui CSR yang diberikan pihak swasta kepada masyarakat Kandri melalui pokdarwis dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat.

Kata Kunci : Desa Wisata, Pengelolaan, Kemitraan

PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata mulai merambah ke dalam berbagai aspek seperti, *ecotourism, sustainable tourism development, village tourism* yang merupakan pendekatan pengembangan pariwisata agar dapat dilaksanakan di daerah bukan perkotaan, juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang ada khususnya di wilayah desa. Salah satu contoh alternatif adalah pembangunan desa wisata. Pengertian desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan. Negara Indonesia merupakan negara yang masih memiliki wilayah pedesaan cukup banyak, berbagai potensi alam juga terdapat di desa, oleh karena itu pembangunan desa wisata diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk masyarakat sekitar desa wisata tersebut.

Pembangunan desa wisata berfokus pada bagaimana pembangunan desa secara berkesinambungan diarahkan pada aspek kepariwisataan. Hal yang disuguhkan oleh desa wisata adalah tetap terjaganya kualitas kehidupan masyarakat desa dan keaslian daerah setempat. Keaslian tersebut mencakup keaslian ekonomi, fisik, kultur dan sosial daerah tersebut.

Kota Semarang juga memiliki sejumlah desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Kandri. Pemerintah Kota Semarang menetapkan Desa Wisata Kandri sejak tahun 2012 melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 556/407. Desa Wisata Kandri terletak di dataran tinggi Kota Semarang tepatnya di Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 245,490 ha. Desa Wisata Kandri juga memiliki 2 obyek wisata yaitu Goa Kreo dan waduk buatan bernama Waduk Jatibarang. Desa Wisata Kandri mengusung tema wisata budaya yang dikemas ke dalam paket wisata *one day tour* dimana wisatawan dapat memilih paket wisata yang sudah disediakan oleh pihak pengelola desa wisata. Keunikan Desa Wisata Kandri juga terlihat dari tata letak ruang desa dimana masing-masing RW mempunyai ciri khas masing-masing sebagai destinasi wisata. Desa Wisata

Kandri merupakan desa wisata bentukan artinya desa wisata ini sengaja diciptakan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai destinasi wisata berbasis budaya.

Pemerintah sebagai penentu kebijakan sekaligus pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan harus mampu menggerakkan seluruh komponen dibawahnya untuk mengembangkan desa wisata. Dalam mengembangkan desa wisata, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, harus melibatkan berbagai pihak lain yang dapat menjadi faktor pendukung kemajuan desa wisata seperti swasta, organisasi-organisasi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Namun dalam kerjasama tersebut belum cukup efektif disebabkan karena yang terjalin hanya bertahan sekali waktu saja dan kurang terfokus pada apa yang menjadi urgensi dalam meningkatkan kemajuan Desa Wisata Kandri. Hal lainnya adalah terdapat beberapa kendala yang ada baik dari segi sosial, budaya, dan wilayah Desa Wisata Kandri.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan dan dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan dari beberapa sumber yang relevan baik dari jurnal maupun media online. Proses wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kepala Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Pokdarwis Pandanaran dan Sukomakmur, serta masyarakat Desa Wisata Kandri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Asal-usul Pokdarwis Desa Wisata Kandri

Jauh sebelum terbentuknya Desa Wisata Kandri yang diresmikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui SK Walikota Semarang Nomor. 556/407 Tahun 2012, masyarakat Kelurahan Kandri telah membentuk pokdarwis yaitu Pokdarwis Kerincing yang pada saat ini berganti nama menjadi Pokdarwis Pandanaran. Pokdarwis Pandanaran adalah Pokdarwis

pertama yang berdiri pada tahun 1993 di Desa Kandri. Adapun tokoh-tokoh pendiri Pokdarwis Pandanaran ini pada awalnya merupakan masyarakat Kandri yang berperan sebagai penggiat wisata di wilayah obyek wisata Goa Kreo, Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat yang tergabung dalam Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang ada di Kelurahan Kandri. Posisi pokdarwis pandanaran yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi alam dan budaya yang dimiliki Kandri mendapat sambutan yang baik dari pemerintah kelurahan setempat yang kemudian keberadaan Pokdarwis Pandaran disahkan secara legal berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kelurahan Kandri pada tahun 2012 yang bersamaan dengan dikeluarkannya SK Walikota Semarang tentang penetapan Desa Wisata. Pada saat ini wilayah kerja Pokdarwis Pandanaran meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kandri. Hanya saja keberadaan Pokdarwis Pandanaran berada di RW II.

Seiring berjalannya waktu, kondisi Pokdarwis Pandanaran mulai berubah dikarenakan adanya ketidaksesuaian ide dan tujuan antara anggota yang tergabung didalamnya, munculnya perbedaan persepsi, dan rasa ketidakadilan menjadi pemicu pecahnya Pokdarwis Pandanaran. Adanya rasa kecemburuan antara masyarakat yang tinggal di dekat obyek wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang dianggap mempunyai peluang ekonomi lebih baik dibandingkan masyarakat yang jauh dengan obyek wisata tersebut. Pada akhirnya muncul pokdarwis baru yang bernama Pokdarwis Sukomakmur, pokdarwis ini terbentuk atas inisiasi masyarakat khususnya masyarakat Talun Kacang Kelurahan Kandri. Keberadaan pokdarwis ini tepatnya di wilayah RW III Kelurahan Kandri dekat obyek wisata Waduk Jatibarang dan Goa Kreo.

1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pokdarwis Sebagai Pengelola Desa Wisata Kandri

Pokdarwis Desa Kandri merupakan kelompok yang berperan langsung dalam menggerakkan elemen masyarakat wilayah Kandri, sekaligus organisasi yang bertanggungjawab dalam mengelola potensi wisata Desa Wisata Kandri. Sebagai suatu

organisasi pokdarwis mempunyai suatu bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang menjadi stakeholder dalam mengembangkan Desa Wisata Kandri.

Bentuk pelaporan pertanggungjawaban adalah melalui rapat rutin tahunan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Selain itu, pokdarwis juga bertanggungjawab kepada masyarakat dan pihak keamanan setempat. Tanggung jawab pengelolaan juga mencakup pemeliharaan, pelestarian, penataan, dan hak melakukan pungutan masuk bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kandri.

2.1 Pengelolaan Desa Wisata Kandri

Dalam mewujudkan kemajuan Desa Wisata Kandri para pihak stakeholder terkait telah memiliki perencanaan program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari aspek pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik dari dinas terkait pihak akademisi, maupun swasta, diantaranya melakukan pelatihan pembuatan produk souvenir dan kuliner, pelatihan untuk anggota pokdarwis, serta pelatihan seni budaya. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penyiapan alih profesi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatibarang sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pengembangan UKM ditingkat desa. Perencanaan lainnya juga berkaitan dengan seni dan budaya lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Wisata Kandri, tradisi budaya Nyadran Kali, Nyadran Sendang, Apitan dan puncaknya Sesaji Rewandha merupakan kegiatan perhelatan seni budaya khas Desa Wisata Kandri yang menjadi program rutin sekaligus media promosi untuk meningkatkan animo masyarakat agar berkunjung ke Desa Wisata Kandri.

2.2 Aktor – Aktor Pengelola Desa Wisata Kandri

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengelola Desa Wisata Kandri adalah pokdarwis. Pokdarwis ini adalah Pokdarwis Pandanaran yang wilayah kerjanya di RW I dan RW II, dan Pokdarwis Sukomakmur yang berada di dekat obyek wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang dilingkungan RW III dan RW IV. Anggota pokdarwis telah memiliki

kompetensi yang baik setelah melalui proses pembinaan dan pelatihan sehingga diharapkan dapat mengelola Desa Wisata Kandri dengan maksimal. Kedua pokdarwis ini memegang peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berperan aktif membangun desa wisata dalam berbagai bentuk kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun dalam prakteknya salah satu pokdarwis yaitu Pokdarwis Sukomakmur mempunyai kewenangan untuk ikut mengelola obyek wisata yang ada di dekat Desa Wisata Kandri. Selain pokdarwis tentunya kemajuan Desa Wisata Kandri memerlukan para aktor pendukung seperti pihak pemerintah Kota Semarang melalui SKPD terkait selaku fasilitator, pembina dan pengawas pengelolaan serta Pemerintah Kelurahan Kandri selaku pimpinan tertinggi di wilayah Kandri.

2.3 Koordinasi Stakeholders dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri

Koordinasi yang telah dilakukan khususnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan Pemerintah Kelurahan Kandri sudah baik. Pihak dinas terkait mengupayakan agar aspirasi-aspirasi masyarakat Desa Wisata Kandri terakomodasi dengan baik, walaupun dalam prakteknya belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dilapangan yang menjadi hambatan dalam proses koordinasi tersebut misalnya adalah adanya dua kubu pokdarwis yang ada di Desa Wisata Kandri dimana antara pokdarwis tersebut masih sering terjadi konflik, dan juga pemerintah Kelurahan Kandri yang kesulitan dalam memberi kendali kepada kelompok pokdarwis tersebut dalam hal tertib administrasi seperti data jumlah pengunjung, data jumlah bantuan, yang sampai saat ini belum dijalankan dengan baik.

2.4 Penglibatan Masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri

Pengelolaan Desa Wisata Kandri tidak hanya berpusat pada pokdarwis, pokdarwis merupakan organisasi yang menjadi payung bagi organisasi maupun lembaga masyarakat yang ada di bawahnya. Pengelolaan Desa Wisata Kandri berkerja sama dengan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola Desa Wisata Kandri agar menjadi sebuah desa wisata yang layak dijual kepada wisatawan. Hal tersebut dibuktikan dengan

adanya suatu asosiasi Mekarsari yang dimiliki oleh Pokdarwis Pandanaran dimana dalam asosiasi tersebut terdapat kelompok swadaya masyarakat seperti KSM Pandu Jaya yang anggotanya menjadi pemandu wisata, KSM Goker sebagai kelompok pembuat souvenir. Artinya asosiasi mekarsari dibentuk sebagai wadah dari kelompok swadaya masyarakat di Desa Wisata Kandri. Namun, belum semua masyarakat terlibat dalam mengelola potensi Desa Wisata Kandri, hanya sebagian masyarakat yang dilibatkan dalam berbagai forum kegiatan yang diselenggarakan oleh pokdarwis seperti rapat tingkat kelurahan maupun pertemuan rutin sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi dengan baik.

2.5 Kendala dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kemajuan Desa Wisata Kandri diantaranya adalah terkait dengan sulitnya merubah pola pikir masyarakat Desa Wisata Kandri yang sartinya masyarakat belum siap secara mental, dan fisik dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan mereka, sebagian besar masyarakat Kandri masih belum mengerti benar perbedaan antara obyek wisata dengan desa wisata, hal tersebut dikarenakan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah dan pola pikir masyarakat yang cenderung masih tradisional. Kesiapan Sumber Daya Manusia Desa Wisata Kandri terus dipacu oleh seluruh stakeholder dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak seperti kalangan akademisi maupun mitra swasta. Keterbatasan sumber daya manusia salah satunya disebabkan oleh kondisi demografis, seperti tingkat pendidikan sebagian besar penduduk berusia produktif hanya sampai pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) serta minimnya pengalaman petugas pengelola desa wisata dalam bidang manajemen. Hambatan kedua, adalah terbatasnya infrastruktur / fasilitas pendukung kegiatan wisata.

2.6 Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Desa Wisata Kandri

Proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi terkait dengan program dilaksanakan satu tahun sekali. Sedangkan dari sisi stakeholder pemerintah khususnya Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata mekanisme pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan cara menyusun skala prioritas yang disesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang serta melakukan kunjungan ke Desa Wisata Kandri secara rutin untuk melihat keadaan lingkungan sekaligus memantau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di Desa Wisata Kandri, pihak yang melakukan kunjungan rutin ke Desa Wisata Kandri merupakan perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang khususnya bidang Pembinaan Industri Pariwisata sub. Bagian Destinasi dan Objek Wisata. Proses pengawasan dan evaluasi juga tidak hanya dilakukan oleh aktor pemerintah, namun pokdarwis selaku pihak yang terlibat langsung dalam mengelola Desa Wisata Kandri juga melakukan hal demikian dengan mengadakan rapat tahunan seluruh anggota pokdarwis untuk membahas program

3.1 Bentuk Kemitraan Desa Wisata Kandri

3.2 Aktor Kemitraan

Aktor – aktor yang berperan dalam pola kemitraan desa wisata kandri terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. Peran pemerintah dibuktikan dengan diterbitkannya SK Walikota Semarang yang mengatur tentang desa wisata sebagai wujud nyata bahwa pemerintah Kota Semarang menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kemajuan di wilayah tempat tinggalnya serta keseriusan pemerintah dalam membangun pariwisata daerah khususnya di Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan fasilitator untuk menghubungkan pokdarwis Desa Wisata Kandri dengan pihak swasta, dalam hal kemitraan pemerintah Kota Semarang meletakkan semua kewenangan kerjasama pada pemerintah kelurahan kandri dan pokdarwis selaku pengelola Desa Wisata Kandri. Pokdarwis selaku pengelola Desa Wisata Kandri menjadi ujung tombak dalam menjalin kemitraan, sebagai motor penggerak pokdarwis mempunyai kewenangan langsung dalam menerima kerjasama yang ditawarkan oleh pihak swasta. Peran pokdarwis juga sangat penting dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat

Kandri terkait dengan kemitraan dan bantuan apa saja yang akan diterima untuk Desa Wisata Kandri serta melibatkan masyarakat dalam kemitraan tersebut.

3.3 Bentuk Kemitraan

Adapun bentuk kemitraan yang melibatkan aktor non pemerintah sebagian besar adalah lewat pemberian dana CSR yang diberikan oleh mitra swasta kepada masyarakat Kandri. Ada beberapa pihak swasta yang memberikan dana CSR untuk Desa Wisata Kandri, diantaranya adalah PT Pertamina Persero dan PT. Angkasa Pura II.

Tujuan kemitraan yang telah dilakukan ini bukan hanya berorientasi kepada pengembangan alam Kandri tetapi juga peningkatan mutu Sumber Daya Manusia masyarakat Kandri. Meskipun ada keterlibatan pihak ketiga maupun swasta namun masyarakat Kandri sebagai penggerak motor desa wisata tetap menjaga karakteristik desa, mereka beralasan konsep yang dijual Desa Wisata Kandri adalah alam dan budayanya, masyarakat Kandri menyambut dengan tangan terbuka adanya keterlibatan pihak ketiga asalkan tidak menimbulkan efek yang negatif kepada lingkungan dan masyarakat.

3.4 Dampak yang ditimbulkan adanya kemitraan

Manfaat yang diterima dari adanya kemitraan yang utama adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan masyarakat lebih memahami keadaan lingkungannya yang menyandang predikat desa wisata sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan yang lebih demi memajukan memajukan desanya, telah diketahui bahwa bentuk kemitraan yang ada diimplementasikan lewat berbagai kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan produk yang melibatkan masyarakat Desa Wisata Kandri, selain itu juga memberikan kepuasan bagi pemerintah setempat karena dengan banyaknya kemitraan yang terbangun sedikit banyak turut membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan maupun pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Kandri dan juga wisatawan yang berkunjung ke desa Kandri, serta memberikan manfaat bagi pelaku industri yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di luar Desa Wisata Kandri dalam mempromisikan produk mereka ke lingkup yang lebih luas.

3.5 Keterlibatan masyarakat dalam kemitraan

Keterlibatan masyarakat dalam proses kemitraan di Desa Wisata Kandri masih belum sepenuhnya terbangun dengan baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua warga Kandri ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Walaupun terdapat pelatihan-pelatihan namun kegiatan tersebut hanya melibatkan sebagian masyarakat Kandri yang mempunyai usaha industri rumah tangga, artinya masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dalam kegiatan pelatihan tersebut.

4.1 Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri

Kerjasama maupun kemitraan harus dibangun antar aktor agar dapat segera mencetak desa wisata yang berdaya jual dengan cara melibatkan seluruh pihak agar turut berpartisipasi dalam mengelola desa wisata. Pada saat ini pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola Desa Wisata Kandri adalah Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis Sukomakmur. Tugas pokdarwis selain sebagai pengelola juga harus bisa merangkul pihak ketiga yaitu swasta untuk bekerjasama dan menjalin kemitraan. Dengan melihat kondisi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kemitraan yang terbangun di Desa Wisata Kandri termasuk pada jenis kemitraan semu (*pseudo partnership*). Kemitraan semu adalah satu jenis kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Pada jenis kemitraan ini, ada satu hal yang unik yaitu kedua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama yang dirasa penting, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaat dari kerjasama tersebut. Kemitraan yang ada selama ini hanya bersifat *as usual* artinya kemitraan tersebut hanya berlangsung sekali waktu saja. Hal ini sesuai dengan kondisi lapangan di Desa Wisata Kandri dimana meskipun ada kerjasama yang melibatkan antara Pokdarwis Desa Wisata Kandri dengan pihak swasta maupun akademisi yang menjalin kerjasama dengan cara memberikan bantuan berupa dana CSR yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan alat pembuatan produk industri rumah tangga, maupun pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam

rangka penyiapan masyarakat Kandri yang beralih profesi sebagai masyarakat penyedia jasa wisata namun dalam mengelola bantuan dari kemitraan tersebut masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia di Desa Wisata Kandri maupun keterbatasan peran pemerintah Kota Semarang yang selama ini hanya sebagai fasilitator.

KESIMPULAN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan objek Desa Wisata Kandri adalah pokdarwis, yaitu Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis Sukomakmur. Kedua pokdarwis memegang peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berperan aktif membangun desa wisata dalam berbagai bentuk kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain pokdarwis, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan sebagai fasilitator sekaligus pembuat kebijakan yang akan diterapkan untuk masyarakat. Dalam pengelolaan daya tarik wisata oleh Desa Wisata Kandri menghadapi beberapa hambatan diantaranya sulitnya merubah pola pikir masyarakat Kandri yang masih terpola tradisional, yaitu minimnya peran stakeholder kepariwisataan dalam mengembangkan desa wisata, belum terjalannya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, pokdarwis dan masyarakat. Berkaitan dengan kemitraan yang ada di Desa Wisata Kandri termasuk dalam jenis kemitraan semu (pseudo partnership). Adapun bentuk kemitraan yang ada di Desa Wisata Kandri sebagian besar melalui CSR yang diberikan pihak swasta kepada masyarakat Kandri melalui pokdarwis dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell W. John.(2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Damanik, Janianton and Weber, Helmut.T.(2006). *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Andi.Yogyakarta
- Handoko, Hani.T. (2008). *Manajemen Edisi 2*. BPFE. Yogyakarta
- Hasfah, Mohammad Jafar. (2000). *Kemitraan Usaha : Kosepsi dan Strategi*. PT.Penebar Swadaya.Jakarta
- Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*.(2004).PLOD Universitas Gajah Mada.Yogyakarta
- Moleong, Prof. Dr. Lexy J.M.A (2007).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya.Bandung
- Oka A. Yoeti.(1990). *Pengantar Ilmu Pariwisata*.Angkasa. Bandung.
- Pitana,I Gede dan Gayatri Putu G.(2005). *Sosiologi Pariwisata*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sugiono, Dr., Prof.(2010).*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, AT.(2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*.Gaya Media.Yogyakarta.
- Sunaryo, Drs. Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Wardiyono dan Baiquni.(2011). *Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata*. Lubuk Agung. Bandung
- Westra, Parianta. (1983). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Gahlia Indonesia. Jakarta

Jurnal :

- Suardana.I.W, dkk (2011). “Penataan Kemitraan dan kelembagaan Desa Wisata Tista, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan”. *Udayana Mengabdi, Vol. 10 No.1, ISSN : 1412-0925*
- Faris Zakaria, dkk (2014) . “Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. *Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No.2, 2337-3520*
- Laela Hajaroh, dkk (2014). “Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang”. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment NFECE 3(2)(2014), ISSN 2252-6331*
- Ami Suswandi Putra (2013). “Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda”. *Jurnal Nasional Pariwisata Vol.5, No.3, Desember 2013 (189-200). ISSN 1411-9862.*
- Made Heny Urmila Dewi, dkk. “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali” *Kawistara Vol.3, No.2, 17 Agustus 2013 (117-226).*
- Dimas Kurnia Purnada, dkk. “Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Demak)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).Vol.32,No.2 Maret 2016. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id*

Undang-Undang :

Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 556/407 tanggal 12 Desember 2012
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Internet :

- <http://al-bantany-112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teor-kerjasama.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2016 pukul 19.48
- http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_DESA_WISATA.pdf diakses pada tanggal 7 mei 2016 pukul 16.55
- http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_geo_0703773_chapter2x.pdf diakses pada tanggal 11 Mei pukul 23.04
- <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp246bf6676full.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 11.37

http://jateng.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Jawa_Tengah-2015-.pdf diakses pada tanggal 30 September 2016 pukul 11.37
<http://www.e-kin.semarangkota.go.id/user> diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 14.30